

Esai

# Spiritualitas Ekologis: Peran Agama dalam Mengatasi Krisis Iklim

**Khalisah Khalid**

*Greenpeace Indonesia.*  
Email: [khalisah.khalid@greenpeace.org](mailto:khalisah.khalid@greenpeace.org)

**Hamzah Fansuri**

*University of Heidelberg, Germany;*  
*MAARIF Institute.*  
Email: [hamzah.fansuri@maarifinstitute.org](mailto:hamzah.fansuri@maarifinstitute.org)

Nilai-nilai agama dan isu lingkungan hidup sebenarnya tidak terpisahkan, tetapi sering dianggap sebagai hal yang berbeda karena pemaknaan agama yang sempit, yang hanya menekankan hubungan vertikal dengan Tuhan atau, jika diperluas, sebatas interaksi antar manusia. Namun, di tengah krisis multidimensi dan bencana iklim yang sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia, pemaknaan beragama perlu diperluas agar mencakup kepedulian terhadap alam. Kesadaran akan peran agama dalam menyelamatkan Bumi semakin berkembang dalam dua dekade terakhir, mendorong umat beragama untuk merefleksikan kembali relasinya dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan—*hablumminallah, hablumminannas, hablum minal alam*. Pada akhirnya, spiritualitas harus menjadi pedoman dalam upaya kolektif menyelamatkan Bumi dan seluruh makhluk hidup dari ancaman krisis iklim.

## Krisis Global

Masyarakat dunia saat ini menghadapi tantangan global yang semakin berat. Laporan *Global Risk Perception Survey 2022-2023* dari Forum Ekonomi Dunia menempatkan kerusakan lingkungan, krisis iklim, dan dampaknya sebagai risiko global tertinggi dalam dua hingga sepuluh tahun ke depan. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukan sekadar isu lokal, melainkan ancaman global yang harus segera diatasi.

Salah satu penyebab utama dari krisis multidimensi ini adalah sistem ekonomi kapitalisme yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Model

pembangunan yang ekstraktif terus menguras bumi demi kebutuhan energi fosil, yang justru mempercepat pemanasan global. Hutan sebagai paru-paru dunia dibabat, ekosistem mangrove dikeringkan dan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit serta industri skala besar. Tidak hanya daratan, laut dan pesisir pun menjadi target eksploitasi. Ekspansi industri ekstraktif kini menyasar pulau-pulau kecil, menyebabkan masyarakat adat dan komunitas lokal—yang selama ini menjadi penjaga keseimbangan ekologi—terpinggirkan, sementara ketimpangan ekonomi dan kemiskinan semakin meningkat, seperti yang terjadi di Indonesia.

Ancaman kepunahan kini semakin nyata. *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* memperingatkan bahwa sekitar satu juta spesies terancam punah akibat degradasi lingkungan. Jika krisis ini tidak ditangani, suhu bumi akan terus meningkat dan mengancam kehidupan manusia di masa depan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menegaskan bahwa krisis iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh para pemimpin dunia.

Dampak krisis iklim juga semakin dirasakan di Indonesia. Data BNPB tahun 2024 mencatat 1.942 kejadian bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah, dengan lebih dari 5,6 juta orang terdampak akibat banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, kebakaran hutan, hingga pergerakan tanah. Sebagian besar bencana ini merupakan bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh perubahan iklim. Dampaknya semakin luas, mulai dari gagal panen, kelangkaan hasil laut, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Krisis iklim bukan lagi sekadar peringatan, melainkan kenyataan yang sedang

berlangsung. Seperti yang diungkapkan Jared Diamond dalam *Collapse* (2014), kelangsungan atau kehancuran suatu peradaban sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Apabila tidak ada tindakan tegas untuk membatasi eksploitasi sumber daya alam dan menekan emisi karbon, umat manusia berisiko mengalami kehancuran serupa seperti yang dialami oleh banyak peradaban di masa lalu.

### Spiritualitas Ekologis

Masa depan bumi semakin terancam akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dalam sistem ekonomi kapitalistik, yang mempercepat krisis iklim. Kesadaran akan bahaya ini mendorong pemimpin agama dunia untuk mengambil peran dalam penyelamatan lingkungan. Dalam ensiklik *Laudato Si'* (2015), Paus Fransiskus menyerukan 'taubat ekologis' kepada umat Katolik agar bersama-sama melindungi alam. Seruan ini dipertegas kembali dalam *Laudate Deum*, yang menekankan pentingnya aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim.

Kesadaran serupa juga tumbuh di kalangan umat Islam, yang menyadari bahwa krisis iklim mengancam 1,8 miliar Muslim di dunia—seperempat populasi global—dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Berangkat dari nilai-nilai keagamaan, muncul dorongan untuk melakukan aksi nyata dalam menyelamatkan lingkungan dan mencegah dampak krisis iklim yang lebih besar. Dalil-dalil agama pun dikaji ulang agar lebih relevan dalam konteks lingkungan. Dalam Islam, tugas manusia sebagai *khalifatul fil ardl* ditegaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 30, yang menempatkan manusia sebagai pemimpin di bumi. Sayangnya, amanah ini kerap disalahartikan, di mana sebagian orang menggunakan kekuasaan dan modal untuk mengeksploitasi alam demi kepentingan pribadi. Bahkan, bencana sering kali dianggap sebagai takdir

semata, tanpa menyadari bahwa Al-Qur'an jelas menyebutkan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan manusia (QS Ar-Rum: 41) serta melarang tindakan perusakan setelah Allah memperbaikinya (QS Al-A'raf: 56).

Paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan telah mengaburkan kesadaran akan keseimbangan ekologi. Cara pandang ini berkelindan dengan model ekonomi eksploitatif yang merusak alam dan meminggirkan kelompok rentan. Padahal, jika manusia diberi amanah sebagai khalifah, merusak lingkungan sama artinya dengan mengingkari tugas tersebut. Pemikir Islam, Nurcholis Madjid, menegaskan bahwa manusia diberi akal bukan untuk mengeksploitasi bumi, melainkan untuk menciptakan kemakmuran bagi semua makhluk. Ia juga menyatakan bahwa spiritualitas tertinggi seorang khalifah adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil alamin*).

Spiritualitas memegang peran penting dalam menggambarkan ketidakadilan lingkungan dan mendorong transformasi kesadaran. Konsep *ekologi spiritual* menekankan hubungan intuitif manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Budi Munawar dalam diskusi di Maarif House pada 19 Juli 2024, yang bertajuk "*Izin Tambang untuk Ormas, Mashlahah atau Masalah?*", menekankan bahwa integrasi teologi dan ekologi dapat menjadi landasan kuat dalam menjaga keseimbangan alam. Dengan memahami bahwa alam memiliki nilai sakral dan harus dijaga keseimbangannya, komunitas beragama dapat menemukan motivasi yang lebih dalam untuk melindungi lingkungan. Relasi spiritual manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam—*hablumminallah, hablumminannas, hablum minal alam*—harus dimaknai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menghadapi krisis iklim.

## Agama dan Aksi Iklim

Setiap agama memiliki ajaran yang menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Konsep spiritualitas ekologis telah mendorong umat beragama untuk mengambil peran aktif dalam penyelamatan lingkungan, baik melalui gerakan komunitas maupun aksi nyata dalam mengatasi krisis iklim.

Di tingkat global, banyak komunitas dan pemimpin agama yang menyerukan pentingnya keterlibatan umat beragama dalam menjaga bumi dan memperjuangkan transisi energi yang berkeadilan. Aliansi seperti Ummah for Earth dan GreenFaith telah mengadvokasi aksi iklim berbasis keimanan, termasuk di Indonesia.

Di dalam negeri, gerakan penyelamatan lingkungan berbasis agama, khususnya Islam, semakin berkembang dan memperkuat gerakan lingkungan yang telah ada. Organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta kelompok akar rumput seperti FNKSDA dan KHM, berperan dalam mengarusutamakan isu ekologi dalam dakwah dan aksi sosial. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah mengeluarkan *fatwa tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global* sebagai landasan teologis bagi umat Islam dalam menghadapi krisis ini. Dalam kajian PPIM UIN Jakarta (2024), pendekatan ini disebut sebagai *Green Islam*, yang menegaskan hubungan integral antara keimanan dan pelestarian lingkungan. Namun, meskipun gerakan *Green Islam* terus berkembang, masih minim kajian sistematis yang mengeksplorasi strategi, jaringan, dan pengaruhnya dalam kebijakan lingkungan.

Meski gerakan agama dalam isu lingkungan semakin aktif, tantangan yang dihadapi tetap besar. Selama akar masalah, yakni sistem ekonomi kapitalistik yang eksploitatif, tidak dikoreksi, upaya ini hanya akan menjadi solusi

parsial. Lebih buruk lagi, gerakan agama dapat dimanfaatkan sebagai alat legitimasi bagi praktik-praktik yang merusak lingkungan, seperti konsep “tambang ramah lingkungan” atau perdagangan karbon yang sering kali hanya menjadi solusi semu. Oleh karena itu, gerakan agama harus menysar kebijakan ekonomi dan politik yang selama ini justru mempercepat krisis ekologi.

Indonesia telah menetapkan target dalam *Nationally Determined Contribution (NDC)* di bawah Perjanjian Iklim Paris, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan bantuan internasional. Sebagian besar komitmen ini bertumpu pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan (*Forest and Land Use– FoLU*), dengan pengurangan deforestasi sebagai strategi utama (Greenpeace, 2024). Namun, kebijakan nasional justru sering bertentangan dengan komitmen ini. UU Omnibus Law Cipta Kerja dan UU Minerba, misalnya, mempermudah eksploitasi sumber daya alam. Bahkan, pemerintahan baru berencana mengalihfungsikan 20 juta hektare hutan, menganggap deforestasi sebagai sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan.

Kebijakan pemerintah yang memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan

semakin menimbulkan kekhawatiran. Industri pertambangan merupakan salah satu penyebab utama deforestasi, pencemaran air, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Riset Greenpeace dan Celios dalam laporan *Kesejahteraan Semu di Sektor Ekstraktif* menunjukkan bahwa desa-desa tambang mengalami pencemaran lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Aktivitas pertambangan juga merusak ekosistem lokal, mengancam kesehatan, serta memperburuk kondisi ekonomi masyarakat miskin dan kelompok marjinal.

Dengan posisi strategis yang dimiliki pemuka agama dalam tatanan sosial dan politik, ada harapan besar agar mereka turut mengadvokasi kebijakan yang lebih berpihak pada lingkungan dan keadilan sosial. Salah satu langkah konkret yang perlu diperjuangkan adalah lahirnya UU Keadilan Iklim dan UU Masyarakat Adat, yang dapat melindungi hutan serta komunitas adat yang selama ini berperan sebagai penjaga ekosistem. Perlindungan terhadap lingkungan hidup harus menjadi agenda utama, bukan sekadar wacana, agar umat manusia tidak semakin mendekati jurang krisis ekologis yang lebih dalam.

\*\*\*

## Referensi

- Diamond, J. (2014). *Collapse: Runtuhnya peradaban-peradaban dunia*. Jakarta: KPG.
- Greenpeace & Celios. (2024). *Industri pertambangan vs ekonomi hijau*. Retrieved from <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2024/06/bbec3c7b-industri-pertambangan-vs-ekonomi-hijau.pdf>
- Greenpeace Indonesia. (2025). *Pembukaan 20 juta hektare hutan akan perparah krisis iklim: Gagasan kedaulatan pangan dan energi jadi omon-omon*. Retrieved from <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/62102/pembukaan-20-juta-hektare-hutan-akan-perparah-krisis-iklim-gagasan-kedaulatan-pangan-dan-energi-jadi-omon-omon>

- Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). (2019). Media release: Global assessment. Retrieved from <https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment>
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). Fatwa MUI No. 86/2023 tentang hukum perlindungan perubahan iklim global.
- Majid, N. J. (2024). Ekologi spiritual: Konsep dan relevansi pemikiran Nurcholish Madjid. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 9(1), 1–16.
- Munawar-Rachman, B. (2024). Dialog agama dan ekologi. Jurnal Peradaban, 4(1), 1–19. <https://doi.org/10.51353/jpb.v4i1.1001>
- Rukmana, A. (2020). Islam dan ilmu pengetahuan dalam pemikiran Nurcholis Madjid dan Seyyed Hossein Nasr (Doctoral dissertation, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Testriono, et al. (2024). Gerakan Green Islam di Indonesia. Jakarta: UIN Jakarta Press & PPIM UIN Jakarta.
- World Economic Forum. (2023). Global risk perception survey. Retrieved from <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023/digest/>

